

Jangan Patah Semangat Jadi Orang Baik

SALATIGA (KR) - Kepala Rutan Klas IIB Salatiga, Redy Agian mengatakan jangan putus asa dan jangan pernah patah semangat untuk menjadi orang baik. Pesan ini ia sampaikan saat kegiatan tausiyah dan motivasi kepada ratusan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Salatiga mengikuti tausiyah dan motivasi hijrah ke jalan Allah, Selasa (16/1).

"Saya bertanggung jawab mengajak dan membawa saudara sekalian ke jalan yang baik dan benar. Hidup itu pilihan. Saya muliakan seluruh WBP disini, jangan pernah patah semangat menjadi orang baik," kata Redy Agian. Dalam kegiatan ini menghadirkan dua motivator, yakni Hardadi bos singkong keju D9 Salatiga dan Ustadz Jay Nurjaman (Kang Jay). Kegiatan dengan tema 'Hijrah Ke Jalan Allah Untuk menguatkan Hati dalam Terpaan Badai Ujian' digelar di selasar Rutan Salatiga.

Sementara itu bos singkong Hardadi dalam kesempatan ini mengajak para WBP jangan berputus ada dalam menjalani hidup.

"Jangan pernah putus asa, terus semangat, karena hidup yang baik bisa membawa berkah," tambahnya. Ustadz Jay Nurjaman dalam pemberian tausiyah mengingatkan bahwa Rutan Salatiga bukan tempat yang buruk, melainkan tempat yang baik.

"Kalian berada disini karena Allah SWT, baik dan memberikan kesempatan siapa saja untuk bertobat, berhijrah dan kelak menjadi orang baik," katanya. Kang Jay mengungkapkan bahwa siapa saja berhak mendapat rahmat dan menuju jalan Allah SWT, sehingga kelak masuk surga.

Dalam suasana keakraban petugas dan WBP, Kang Jay juga mengajak WBP berdialog untuk merasakan keinginan mereka. Diingatkan bahwa Allah tidak melihat orang pada apa statusnya, tapi bagaimana ketakwaan seseorang. Untuk itu WBP jangan risau apa yang dirasakan saat ini, karena Allah saat ini justru menilai ketakwaan orang. (Sus)-f

Sekda Klaten Tekankan Pelayanan Publik Cepat

KLATEN (KR) - Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten Jajang Prihono meminta seluruh pelayan publik di Kabupaten Klaten untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan murah. Hal ini ditegaskan Jajang, saat membuka Forum Konsultasi Publik Kabupaten Klaten Tahun 2024, di Pendapa Pemkab setempat, Selasa (16/1).

"Perlu disadari, ASN, pegawai BUMD dan lainnya yang digaji dengan dana APBN atau APBD adalah pelayan publik, yang terwadahi dalam masing-masing OPD. Apa-pun yang kita bicarakan, inti dari segala inti yang kita lakukan, fungsi kita adalah pelayan publik," jelas Sekda.

Sehubungan hal itu, Sekda menekankan agar semua pelayan publik introspeksi sudah seperti apa pelayanan yang dilakukan. "Keinginan masyarakat itu sederhana, pelayanan yang cepat, mudah dan murah. Jika masih ada tuntutan lain selain tiga hal itu, maka kita juga harus berusaha untuk memenuhi," tambah Sekda.

Menurut Sekda, sebagai pelayan publik tidak boleh puas hanya dengan tiga item pelayanan yang cepat, mudah dan murah, melainkan terus membuat inovasi serta terobosan baru. "Sekarang paradigma pemerintah sudah berubah. Kita bukan tukang memerintah, tetapi kita ini diperintah. Diperintah untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat," kata Sekda pula.

Kepala Bagian Organisasi Pemkab Klaten Rina Nugroho melaporkan, forum konsultasi publik diselenggarakan untuk memperoleh masukan dari masyarakat terkait kebijakan, sebagai sarana sosialisasi kebijakan pelayanan, serta sebagai pemantau dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang diterapkan.

Selain itu, forum konsultasi publik juga diharapkan menjadi media untuk memperoleh pemahaman yang sama antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Sebagai solusi atas permasalahan terkait dengan perubahan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan serta dampak dan evaluasi kebijakan. Acara menampilkan tiga narasumber, dari Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, dan DPMP TSP. (Sit)-f

Genjot Infrastruktur Jalan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

REMBANG (KR) - Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengatakan, Pemprov Jateng memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan infrastruktur jalan, karena program tersebut bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.

Nana Sudjana mengatakan hal ini saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Rembang Selasa (16/1). Gubernur didampingi sejumlah pejabat terkait melakukan pengecekan hasil pembangunan preservasi jalan di ruas Lasem-Sale Rembang yang telah selesai dikerjakan pada Desember 2023. Pembangunan jalan di ruas tersebut menelan biaya sebesar Rp 16 miliar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023. Berdasarkan tinjauan tersebut, dari total panjang 31,2 kilometer ruas Lasem-Sale, sepanjang 28,4 KM atau 91,03% kondisinya baik. Sisanya 8,97% perlu diperbaiki.

Untuk memperbaiki ruas jalan yang masih perlu perbaikan tersebut, Pemprov Jawa Tengah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,5. Pengerjaannya diperkirakan baru bisa dimulai pada Maret 2024. "Di 2024 ini ada anggaran untuk jalan 1,1 KM dalam bentuk pengaspalan dan 1,6 KM dalam bentuk beton," tutur Nana.

Nana mengatakan pembangunan ruas Lasem-Sale memang lebih banyak menggunakan beton, karena banyak dilintasi kendaraan berat. Untuk itu Gubernur minta agar kontraktor yang mengerjakan nanti bekerja secara profesional. (Bdi)-f



Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana melihat peta hasil pembangunan jalan di Rembang.

Lindungi UMKM, Ganjar Minta Pemerintah Batasi Impor Batik

PEKALONGAN (KR) - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pra-nowo minta kepada pemerintah agar melindungi dan mendukung perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) khususnya di sektor produksi batik. Untuk itu pemerintah harus membatasi impor batik.

Capres Ganjar Pranowo mengatakan hal ini saat berkampanye di Pekalongan Selasa (16/1). Ribuan pelaku UMKM batik Pekalongan kepada Ganjar mengeluhkan kebijakan impor batik oleh pemerintah. Keluhan itu disampaikan saat bertemu Ganjar Pranowo di rumah KH Amin Faizun, seorang tokoh agama di Pekalongan.

Para pengrajin Batik Pekalongan berharap impor batik terutama dari Tiongkok agar bisa dibatasi ketika nantinya Ganjar jadi presiden. "Tolong pak, banyaknya batik impor membuat industri batik dalam negeri kewalahan. Kita sulit bersaing karena harga batik impor itu murah sekali," kata Abdurrahman, Ketua Paguyuban Batik IBC Pekalongan. Abdurrahman berharap Jika nantinya terpilih menjadi Presiden RI, Ganjar melakukan evaluasi kebijakan impor batik, karena banyak pengusaha batik dalam negeri dan potensinya juga lebih baik dibanding batik luar negeri.

Menanggapi keluhan tersebut, Ganjar sepakat dengan usulan para pengrajin batik unhtuk membatasi impor batik melalui regulasi yang jelas. Ganjar khawatir maraknya batik impor bisa membunuh industri batik dalam negeri. "Yang mereka keluhan munculnya batik dari Tiongkok, itu yang membuat harganya jatuh. Saya minta agar pemerintah mempertimbangkan kembali impor batik agar produksi batik dalam negeri



Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kampanye di Pekalongan.

PEMROV JATENG TERIMA LHP BPK
Terkait Kepatuhan Belanja Infrastruktur

SEMARANG (KR)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepatuhan atas Belanja Infrastruktur tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng.

LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hari Wiwoho kepada Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah pada Senin (15/1).

Demikian dikatakan Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana kepada wartawan usai menerima

LHP. Menurut Nana, penyerahan LHP memiliki nilai penting bagi para pengguna anggaran. LHP dapat dijadikan sebagai acuan dalam menjaga ketertiban administrasi keuangan.

"LHP merupakan bagian dari upaya kita untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang

bersih, tertib, berwibawa, dan akuntabel.

Terimakasih kepada BPK yang selama ini berperan penting sebagai pengawas keuangan. Peran itu dinilai sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemerintahan," tutur Nana Sudjana.

Nana mengatakan kemitraan yang dibangun antara Pemprov Jawa Tengah dan BPK telah membuahkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jateng.

Melalui kemitraan yang baik, Jawa Tengah berhasil meraih

bisa mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat.

Ganjar mengatakan sekarang banyak anak muda yang tertarik untuk memproduksi batik. Hal ini harus didorong agar mereka bisa membuat batik semakin mendunia dengan cara pemasaran digital. Ganjar yakin kalau anak muda yang pegang, pasti desainnya lebih kekinian dan mereka bisa memasarkan ke seluruh penjuru dunia melalui digital. (Bdi)-f

MEDIA DIAJAK AWASI KAMPANYE-PEMUNGUTAN SUARA
ASN dan Aparatur Pemerintah Desa Harus Netral

PURWOREJO (KR)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purworejo mengajak media dan penggiat media sosial ikut aktif melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilu 2024. ASN, Kepala Desa dan Aparat Pemerintahan Desa juga diingatkan untuk tetap menjaga netralitas demi menjaga marwah demokrasi.

Ajakan itu disampaikan Komisioner Bawaslu Purworejo, Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu Rinto Hariyadi dalam sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bertema Peran Wartawan dan Admin Media Sosial Dalam Pengawasan Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Purworejo, di Hotel Sanjaya Inn, Kecamatan

Banyuurip, Purworejo, Selasa (16/1).

"Kami mengundang wartawan, pegiat media sosial ikut mensosialisasikan seluruh tahapan Pemilu, khususnya tahapan kampanye, mengingat peran media cukup besar dalam menyampaikan informasi," ucapnya. Menurutnya, pelaku dan pegiat media merupakan agen informasi terkait regulasi kampanye, sehingga masyarakat tahu dan paham. Media juga perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam pelanggaran pemberitaan. "Harus adil, tidak memihak dan berimbang kepada semua peserta Pemilu," ujarnya

Dijelaskan, kampanye rapat umum dan di media massa, akan berlangsung 21 hari sebelum masa tenang, tepatnya mulai tang-

gal 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Kampanye rapat umum dinilai rawan pelanggaran, khususnya berkaitan dengan netralitas, sebab rapat umum melibatkan banyak orang.

"Kami akan fokus mengamati pihak-pihak yang dilarang tetapi ikut kegiatan kampanye rapat umum. Materi kampanye juga akan kami cermati, dilarang menyampaikan isu SARA, ujaran kebencian, menghasut dan sebagainya," jelasnya. Ditegaskan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan kajian, pendalaman dan penyelidikan terhadap dua aparat pemerintah desa yang ikut aktif dalam praktik politik atau tidak netral.

"Kami tengah mendalami kades pembuat meme bersama calon legislatif

yang didukungnya, dan BPD yang kedatangan hadir dalam deklarasi kampanye salah satu Paslon yang didukungnya," tegasnya. Sesuai regulasi, aparat pemerintah desa tidak boleh menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu calon di ranah umum, apalagi ikut berkampanye, meskipun memiliki hubungan keluarga. "Tidak ada alasan! Kades tidak boleh terlibat kampanye, BPD juga harus netral," imbuhnya.

Selain Rinto, tiga narasumber juga dihadirkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya Komisioner Bawaslu, Widya Astuti, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Purworejo, Lukman Khakim, dan perwakilan dari Bakesbangpol Purworejo. (*-5)-f

GOTONG ROYONG PEDULI STUNTING
PHRI Beri Makanan Tambahan Ibu Hamil

SEMARANG (KR) - Peduli akan kebutuhan gizi ibu hamil dan balita dalam mencegah stunting, PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) melakukan pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan balita berat badan kurang, Selasa (16/01), di Hotel Aruss Semarang. Kepala BK-KBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) mengapresiasi upaya gotong royong yang dilakukan PHRI dan Pemerintah Kota Semarang.

Dokter Hasto menjelaskan bahwa memberikan makanan tambahan untuk bayi harus disesuaikan dengan usia bayi. Entah itu makanan tambahan untuk bayi di bawah 1 tahun di atas 6 bulan, begitupun untuk

bayi di usia 12 bulan, 18 bulan sampai dengan 2 tahun.

"Sebetulnya pemberian makanan tambahan (PMT) diberikan kepada keluarga berisiko tinggi, dan keluarga berisiko tinggi, diantaranya ibu hamil. Ibu hamil bisa diberikan makanan dengan bentuk seperti orang dewasa, yang penting ada protein hewani, ada makanan yang mengandung DHA Omega 3, seperti telur, seperti ikan," kata dokter Hasto ketika menjelaskan siapa saja sasaran dalam pemberian makanan tambahan tersebut.

Tak lupa dokter Hasto mengingatkan bahwa menu pada makanan tambahan ditetapkan berdasarkan kebutuhan kecukupan gizi dalam mencegah dan menangani

stunting. "Bukan dari menu dulu yang keluar, tapi dari kebutuhan dulu yang diperlukan untuk mencegah stunting, kemudian dituangkan dalam bentuk menu," kata dokter Hasto melalui virtual meeting.

Launching Pemberian Makanan Tambahan diluncurkan langsung oleh Walikota Semarang, Ir Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu MSos, dihadiri Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program CEM-PAKA (Cegah Stunting Bersama Pengusaha di Kota Semarang) yang telah dirintis pada September tahun lalu dan juga dihadiri langsung Kepala

BKKBN.

Menurut Maria, menu yang disajikan dalam pemberian makanan tambahan oleh PHRI sudah memenuhi kebutuhan gizi. Sehingga diharapkan bisa memberikan dampak dalam menekan angka stunting khususnya di Kota Semarang. "Tadi sa-

ya lihat menunya, ada dua jenis protein hewani. Jadi menu yang memiliki satu jenis protein hewani itu bisa menurunkan stunting. Tapi jika memiliki dua jenis protein hewani maka itu akan lebih cepat dalam menurunkan stunting, efeknya lebih kuat," ungkapny. (Ati)-f



Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil.